Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022
Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Strategi FKUB dalam Menjembatani Aspirasi Minoritas dalam Rekomendasi Kebijakan Masyarakat Multikultural di Wilayah Jakarta Selatan

FKUB's Strategy for Bridging Minority Aspirations in Policy Recommendations for a Multicultural Society in South Jakarta

Adinda Sekar Kinanthi[1], Faqih Savero[2], Nabila Fitria Ariyanti[3], Aniqotul Ummah[4], Teddy Chrisprimanata Putra[5]
[1] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, 2410413003@mahasiswa.upnvj.ac.id
[2] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, 2410413167@mahasiswa.upnvj.ac.id
[3] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Vereran Jakarta, 2410413040@mahasiswa.upnvj.ac.id
[4] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, aniqotul.ummah@upnvj.ac.id
[5] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, teddycputra@upnvj.ac.id
***Corresponding Author: E-mail: 2410413003@mahasiswa.upnvj.ac.id**

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 11 Mei, 2026
Revised: 23 June, 2026
Accepted: 17 July, 2026

Kata Kunci:
FKUB;
Kelompok Minoritas;
Moderasi Beragama;

Keywords:
FKUB;
Minority Groups;
Religious Moderation;

DOI: 10.56338/jks.v9i7.11631

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas terkait rekomendasi kebijakan perizinan rumah ibadah, mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas inovasi program yang dijalankan dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota FKUB Jakarta Selatan dan pihak sekretariat yang terlibat dalam proses mediasi serta rekomendasi kebijakan, didukung oleh studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB Jakarta Selatan menerapkan strategi representasi yang inklusif, pendekatan dialogis, mediasi sosial, dan kolaborasi lintas lembaga dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas. Penelitian juga menemukan adanya tantangan kultural berupa resistensi masyarakat dan pemahaman keberagaman yang eksklusif, serta tantangan struktural berupa kompleksitas regulasi, birokrasi perizinan, dan potensi intervensi politik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategies employed by the South Jakarta Interfaith Harmony Forum (Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB) in accommodating and mediating the aspirations of minority groups regarding policies on the establishment of houses of worship, identify the structural and cultural challenges encountered, and evaluate the effectiveness of its innovative programs in promoting religious moderation. This research employed a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews with FKUB South Jakarta members and secretariat staff directly involved in mediation and policy recommendation processes, supported by document analysis of relevant regulations, academic journals, and related literature. Data analysis was conducted using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that FKUB South Jakarta implements inclusive representation, dialogical approaches, social mediation, and cross-institutional collaboration to bridge the aspirations of minority groups. The study also identifies cultural challenges, including community resistance and exclusive perceptions of diversity, as well as structural challenges such as regulatory complexity, bureaucratic procedures in obtaining permits, and potential political intervention. Furthermore, the "half-room meeting" mediation method has proven effective in resolving conflicts related to the establishment of houses of worship. Educational initiatives, such as FKUB Go to School and FKUB Go to Campus, have contributed to strengthening religious moderation, although their implementation requires further improvement.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi suku, budaya, ras, maupun agama. Keberagaman tersebut menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural yang memerlukan upaya pengelolaan agar tercipta kehidupan yang harmonis. Jakarta Selatan sebagai salah satu wilayah perkotaan di DKI Jakarta merepresentasikan kondisi masyarakat multikultural tersebut, di mana berbagai kelompok agama hidup berdampingan dalam satu ruang sosial. Namun, heterogenitas masyarakat juga berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keagamaan, seperti pendirian rumah ibadah. Berdasarkan data demografis, mayoritas penduduk Jakarta Selatan beragama Islam sebesar 83%, sedangkan 17% lainnya merupakan pemeluk agama minoritas seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Kondisi ini sering memunculkan tantangan bagi kelompok minoritas dalam menyampaikan aspirasi dan memperoleh akses yang setara terhadap hak beribadah, terutama dalam proses perizinan rumah ibadah.

Untuk menjaga kerukunan dan menjembatani berbagai kepentingan tersebut, pemerintah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah komunikasi, dialog, dan mediasi antarumat beragama. FKUB Jakarta Selatan memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan terkait perizinan rumah ibadah sekaligus memfasilitasi penyelesaian konflik yang muncul di tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, FKUB menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural seperti kompleksitas birokrasi dan regulasi, maupun tantangan kultural berupa resistensi masyarakat dan rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai keberagaman. Meskipun demikian, FKUB Jakarta Selatan telah mengembangkan berbagai strategi dan inovasi, seperti metode "pertemuan setengah kamar" serta program edukasi lintas agama yang bertujuan memperkuat moderasi beragama dan menjaga keharmonisan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi FKUB Jakarta Selatan dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas terkait rekomendasi kebijakan perizinan rumah ibadah, mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang dihadapi dalam memelihara kerukunan masyarakat multikultural, serta mengevaluasi efektivitas berbagai inovasi program yang dijalankan dalam upaya mengarusutamakan moderasi beragama dan menjaga stabilitas hubungan antarumat beragama di wilayah Jakarta Selatan.

METODE

a. Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam strategi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Selatan dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas pada masyarakat multikultural. Konteks penelitian berfokus pada peran FKUB Jakarta Selatan dalam proses pemberian rekomendasi kebijakan perizinan rumah ibadah serta upaya menjaga kerukunan antarumat beragama di wilayah Jakarta Selatan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah FKUB Jakarta Selatan sebagai lembaga yang berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam penyelesaian berbagai persoalan keagamaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas anggota FKUB Jakarta Selatan yang bertugas pada bidang rekomendasi dan komisi dialog, serta pihak sekretariat FKUB yang terlibat langsung dalam proses mediasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

b. Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci dari FKUB Jakarta Selatan untuk memperoleh informasi mengenai strategi mediasi, tantangan yang dihadapi, serta inovasi program yang dijalankan dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan FKUB dan pendirian rumah ibadah, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 dan 8 Tahun 2012, serta berbagai buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

c. Pengukuran dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengukuran dilakukan melalui penggalian makna, interpretasi, dan pemahaman terhadap informasi yang diperoleh dari informan dan dokumen penelitian. Fokus pengukuran diarahkan pada strategi FKUB dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas, tantangan struktural dan kultural yang dihadapi, serta efektivitas inovasi program yang dijalankan untuk mendukung moderasi beragama. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi sehingga memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang diperoleh untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB Jakarta Selatan menjalankan peran penting sebagai mediator dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas terkait rekomendasi kebijakan perizinan rumah ibadah. Strategi yang digunakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga menekankan pendekatan sosial melalui dialog dan mediasi. Komposisi keanggotaan FKUB yang terdiri atas perwakilan berbagai agama menjadi faktor penting dalam memastikan adanya representasi kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan. Representasi tersebut memungkinkan aspirasi masyarakat disampaikan secara lebih inklusif dan mengurangi potensi marginalisasi kelompok agama tertentu. Temuan ini sejalan dengan konsep multikulturalisme yang menekankan pentingnya kesetaraan dan pengakuan terhadap seluruh kelompok dalam kehidupan sosial (Hidayat, 2021).

Dalam praktiknya, FKUB Jakarta Selatan menerapkan pendekatan pre-mediation melalui komunikasi informal dengan tokoh masyarakat sebelum suatu persoalan dibahas dalam forum resmi. Strategi ini bertujuan untuk memetakan potensi resistensi masyarakat dan membangun pemahaman bersama terkait kebutuhan kelompok pemohon rumah ibadah. Selain itu, FKUB secara aktif melakukan koordinasi dengan Kesbangpol dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat legitimasi rekomendasi yang dikeluarkan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik keagamaan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi yang partisipatif dan inklusif (Nuriah & Prihatini, 2022).

Penelitian ini juga menemukan adanya berbagai tantangan yang dihadapi FKUB Jakarta Selatan dalam menjalankan fungsinya. Tantangan kultural berasal dari masih adanya kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman eksklusif terhadap keberagaman sehingga menimbulkan resistensi terhadap pendirian rumah ibadah. Selain itu, beberapa kasus menunjukkan adanya motif non-ibadah, seperti kepentingan ekonomi dan politik, yang turut mempersulit proses mediasi. Sementara itu, tantangan struktural meliputi kompleksitas regulasi, persyaratan administratif yang ketat, koordinasi birokrasi yang panjang, serta adanya upaya intervensi politik dalam proses perizinan rumah ibadah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kerukunan umat beragama di wilayah perkotaan memerlukan kemampuan adaptasi yang tinggi dari lembaga mediasi seperti FKUB.

Temuan lain menunjukkan bahwa inovasi program FKUB Jakarta Selatan cukup efektif dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Metode "pertemuan setengah kamar" terbukti mampu membantu penyelesaian kasus perizinan rumah ibadah yang mengalami hambatan hingga bertahun-tahun. Selain itu, program FKUB Go to School dan FKUB Go to Campus menjadi upaya edukatif untuk menanamkan nilai toleransi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Efektivitas berbagai program tersebut dibuktikan dengan keberhasilan FKUB Jakarta Selatan memperoleh penghargaan Harmony Award tingkat nasional, yang menunjukkan kapasitas kelembagaan FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat multikultural.

DISKUSI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB Jakarta Selatan memiliki peran yang signifikan dalam menjembatani aspirasi kelompok minoritas pada masyarakat multikultural, khususnya dalam proses rekomendasi kebijakan perizinan rumah ibadah. Temuan ini memperkuat pandangan multikulturalisme yang menekankan pentingnya pengakuan, kesetaraan, dan partisipasi seluruh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik (Parekh, 2000). Dalam konteks Jakarta Selatan yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi, keberadaan FKUB menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kelompok minoritas memperoleh ruang yang memadai dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan keagamaannya. Representasi berbagai agama dalam struktur keanggotaan FKUB menunjukkan upaya nyata untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan demokratis. Temuan ini sejalan dengan Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa masyarakat multikultural memerlukan mekanisme yang mampu menjamin keterlibatan seluruh kelompok secara setara dalam ruang publik.

Strategi yang diterapkan FKUB Jakarta Selatan menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan perizinan rumah ibadah tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan administratif. Penelitian menemukan bahwa FKUB lebih mengutamakan pendekatan dialogis melalui komunikasi informal dan mediasi sebelum suatu kasus dibahas dalam forum resmi. Pendekatan ini memungkinkan FKUB memahami akar permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk adanya kesalahpahaman, rumor, atau kecemasan sosial yang sering kali menjadi penyebab utama penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Temuan tersebut mendukung penelitian Huda (2019) yang menjelaskan bahwa keberhasilan FKUB dalam menjaga kerukunan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya membangun komunikasi dan dialog antarkelompok. Dengan demikian, FKUB tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberi

rekomendasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang berupaya membangun konsensus sosial di tengah keberagaman.

Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa FKUB Jakarta Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Tantangan kultural muncul dari adanya kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman eksklusif terhadap keberagaman sehingga sulit menerima keberadaan kelompok agama lain di lingkungan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kerukunan umat beragama tidak semata-mata berkaitan dengan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat literasi keberagaman masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Yusuf (2021) yang menyatakan bahwa kerukunan umat beragama memerlukan sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai fondasi utama kehidupan sosial. Selain itu, adanya motif non-keagamaan seperti kepentingan ekonomi dan politik dalam beberapa kasus perizinan rumah ibadah turut memperumit proses mediasi yang dilakukan FKUB.

Selain tantangan kultural, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan struktural yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja FKUB. Persyaratan administratif yang ketat, panjangnya proses birokrasi, serta koordinasi dengan berbagai instansi teknis sering kali memperlambat proses penerbitan rekomendasi. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan adanya upaya intervensi politik yang berpotensi mengganggu independensi FKUB dalam mengambil keputusan. Temuan ini memperkuat pandangan Al-Hamdi (2020) bahwa regulasi pendirian rumah ibadah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala birokratis yang dapat menghambat pemenuhan hak beribadah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan prosedur administrasi dan penguatan posisi kelembagaan FKUB agar mampu menjalankan fungsi mediasi secara lebih efektif dan independen.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa inovasi yang dikembangkan FKUB Jakarta Selatan memberikan kontribusi positif terhadap upaya pengarusutamaan moderasi beragama. Metode "pertemuan setengah kamar" terbukti efektif dalam membantu penyelesaian konflik karena memungkinkan setiap pihak menyampaikan pandangannya secara lebih terbuka sebelum dilakukan dialog bersama. Pendekatan ini sejalan dengan konsep mediasi yang dikemukakan oleh Moore (2014), yaitu bahwa penyelesaian konflik akan lebih efektif apabila mediator mampu memahami kepentingan masing-masing pihak secara mendalam sebelum mempertemukan mereka dalam proses negosiasi. Selain itu, program FKUB Go to School dan FKUB Go to Campus menunjukkan komitmen FKUB dalam membangun budaya toleransi sejak dini, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan agar menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKUB Jakarta Selatan menjalankan perannya melalui pendekatan representasi yang inklusif, dialog antarpihak, mediasi sosial, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Strategi tersebut memungkinkan aspirasi kelompok minoritas dapat disampaikan dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan secara lebih adil dan partisipatif. Penelitian ini juga menemukan bahwa FKUB Jakarta Selatan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat kultural maupun struktural. Tantangan kultural meliputi masih adanya pemahaman eksklusif terhadap keberagaman, resistensi sebagian masyarakat terhadap pendirian rumah ibadah, serta munculnya kepentingan non-keagamaan dalam proses pengajuan perizinan. Sementara itu, tantangan struktural mencakup kompleksitas regulasi, panjangnya prosedur birokrasi, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, serta potensi intervensi politik yang dapat memengaruhi independensi proses rekomendasi. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa berbagai inovasi yang dikembangkan FKUB Jakarta Selatan, khususnya metode "pertemuan setengah kamar", terbukti efektif dalam membantu penyelesaian konflik dan mempercepat tercapainya kesepahaman antar pihak yang bersengketa. Program edukasi seperti FKUB Go to School dan FKUB Go to Campus juga berkontribusi dalam memperkuat nilai toleransi dan moderasi beragama, meskipun implementasinya masih perlu

ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. FKUB Jakarta Selatan telah menunjukkan kapasitas kelembagaan yang adaptif dalam mengelola keberagaman dan menjaga kerukunan umat beragama di wilayah perkotaan yang multikultural.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, FKUB Jakarta Selatan disarankan untuk memperluas program edukasi moderasi beragama, khususnya kepada kelompok masyarakat yang masih memiliki pemahaman eksklusif terhadap keberagaman. Penguatan program seperti FKUB Go to School dan FKUB Go to Campus perlu dilakukan melalui peningkatan frekuensi kegiatan, perluasan sasaran peserta, serta kolaborasi dengan institusi pendidikan dan organisasi masyarakat. Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Kesbangpol juga perlu melakukan penyederhanaan prosedur perizinan rumah ibadah serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar proses administrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan penguatan posisi kelembagaan FKUB melalui dukungan regulasi dan sumber daya yang memadai guna menjaga independensi forum dalam menjalankan fungsi mediasi dan pemberian rekomendasi kebijakan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan kelompok minoritas, tokoh masyarakat, dan instansi pemerintah terkait sebagai informan penelitian.

KETERBATASAN

1. Penelitian hanya berfokus pada FKUB Jakarta Selatan sebagai lokasi penelitian sehingga temuan yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan yang terdapat di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada FKUB di daerah lain yang memiliki komposisi masyarakat, dinamika konflik, maupun pola hubungan antarumat beragama yang berbeda.
2. Jumlah dan variasi informan dalam penelitian masih terbatas pada anggota FKUB Jakarta Selatan dan pihak sekretariat yang terlibat langsung dalam proses mediasi dan rekomendasi kebijakan. Keterbatasan ini berpotensi menghasilkan perspektif yang lebih dominan dari sudut pandang kelembagaan FKUB, sementara pandangan kelompok minoritas, masyarakat sekitar lokasi rumah ibadah, maupun instansi pemerintah terkait belum tergali secara mendalam. Akibatnya, beberapa aspek mengenai efektivitas strategi FKUB mungkin belum sepenuhnya terungkap secara komprehensif.
3. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi dokumentasi menyebabkan hasil penelitian sangat bergantung pada kualitas informasi yang diberikan oleh informan serta kemampuan peneliti dalam melakukan interpretasi data. Oleh karena itu, kemungkinan adanya subjektivitas dalam proses pengumpulan dan analisis data tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun demikian, keterbatasan ini bukan disebabkan oleh kesalahan penelitian, melainkan merupakan konsekuensi metodologis dari penggunaan pendekatan kualitatif yang bertujuan memperoleh pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hamdi, R. (2020). Politik Lokal dan Hambatan Struktural Perizinan Rumah Ibadah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayat, A. (2021). Multikulturalisme dan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Huda, N. (2019). FKUB dan Resolusi Konflik Keagamaan di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Moore, C. W. (2014). The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict (4th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.

Nuriah, R., & Prihatini, R. L. (2022). Strategi Komunikasi Penyuluh dalam Menanamkan Nilai Toleransi Antar Umat Beragama di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta. Jurnal Penyuluhan Agama (JPA), 9(2), 121–146.

Parekh, B. (2000). Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. London: Palgrave Macmillan.

Yusuf, M. (2021). Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Sosial Indonesia. Bandung: Alfabeta.